



TANTANGAN EKONOMI ASIA DAN PERAN THE ASIAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY

Lisbet*)

Abstrak

Sidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Parlemen Asia telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Agustus lalu di Jakarta. Sidang yang bertema Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity tersebut berhasil mengesahkan 5 draf resolusi yang selanjutnya akan dibahas dalam sidang pleno APA di Kamboja akhir tahun ini. Pengesahan tersebut memperkuat tonggak komitmen politik parlemen negara-negara di kawasan Asia untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan ekonomi bersama ke depan.

Pendahuluan

Asian Parliamentary Assembly (APA) dibentuk tanggal 12-14 November 2006 saat terselenggaranya *the Seventh Session of the Association of Asian Parliamentary for Peace (AAPP)* di Teheran, Iran. APA, yang merupakan keberlanjutan dari AAPP, dalam statutenya menyebutkan bahwa forum ini dibentuk untuk menciptakan perdamaian melalui kerja sama ekonomi, sosial dan budaya. Untuk memperkuat arah kerjanya, lima Komisi Tetap (*Standing Committee*) APA juga telah dibentuk, yaitu *Committee on Political Issues, Committee on Peace and Security Issues, Committee on Social and Cultural Issues, Committee on Economic and Sustainable Development*, dan *Committee on Energy*. Seluruh isu penting yang menjadi perhatian di kawasan

Asia dibahas pada sidang Komisi ini untuk dijadikan draf resolusi. Setiap anggota APA dapat mengajukan proposalnya pada proses pembuatan draf resolusi yang terdapat pada Komisi Tetap agar kepentingan nasional negaranya dapat terakomodasi.

Saat ini keanggotaan APA terdiri dari 42 parlemen anggota dan 17 parlemen *observer*. Penentuan jumlah suara didasarkan dari jumlah populasi penduduk negara tersebut. China dan India memiliki suara terbanyak, yakni 7 suara. Sedangkan Indonesia memiliki 6 suara.

Dengan jumlah penduduk yang mencakup 60 persen jumlah penduduk dunia, Asia memiliki berbagai tantangan terkait ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya tantangan,

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, email: lisbet.sihombing@dpr.go.id



kawasan ini juga memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah yang makmur dan damai jika negara-negara di kawasan dapat bekerja sama dengan baik. APA, khususnya melalui *Standing Committee on Economic and Sustainable Development* dapat menjadi forum negara-negara Asia untuk menghasilkan solusi-solusi strategis bagi Asia di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Tantangan Ekonomi APA

Isu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian penting APA. Asia memiliki potensi sekaligus tantangan sebagai benua terpadat dan terbesar di dunia. Lebih dari 4,3 miliar penduduk atau 60 persen jumlah penduduk dunia ada di Asia. Berbagai upaya ekonomi dan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan agar kawasan Asia menjadi wilayah yang makmur dan damai. Peran APA sangat penting dalam isu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. APA, telah berulang-ulang mengadakan sidang dan telah banyak resolusi dan deklarasi yang dihasilkan. Namun demikian, menurut wakil ketua DPR, Fadli Zon, belum banyak kemajuan yang dicapai dalam kerangka kerja sama APA. Hal ini menjadi tantangan yang harus dipikirkan bersama antar parlemen se-Asia.

Dengan tujuan tersebut di atas *Standing Committee APA on Economic and Sustainable Development* mengadakan sidang pada tanggal 19-20 Agustus lalu di Jakarta. Sidang ini merumuskan berbagai permasalahan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Asia dan diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menemukan solusi strategis bagi Asia di tengah-tengah pelambatan ekonomi dunia. Dengan mengusung tema *Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity*, sidang tersebut telah berhasil menyusun 5 draf resolusi yang diharapkan akan menjadi komitmen parlemen negara-negara di kawasan Asia untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berkembang. Kelima draf resolusi ini kemudian akan disahkan pada Sidang Pleno ke-8 APA bulan Desember mendatang di Phnom Penh, Kamboja.

Dalam upaya membangun Asia yang makmur dan damai tersebut, sidang Komisi APA ini membahas empat isu lanjutan dari draf resolusi yang sebelumnya telah dibahas di Sidang Pleno ke-7 APA di Lahore, Pakistan. Keempat isu tersebut adalah *Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth; Asian Integrated Energy Market; Poverty Eradication; dan Environmental Issues, Global Warming, Climate Change, and Planting Billions of Trees throughout Asia*. Keempat isu ini masih relevan untuk dibahas karena masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota APA. Selain keempat isu tersebut terdapat isu baru yang merupakan usulan Indonesia, yaitu mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Isu *Asian Intergrated Energy Market* menjadi isu penting untuk dibahas karena posisi cadangan minyak dunia sebesar 62 persen terletak di kawasan Asia. Begitu pula dengan cadangan gas sebanyak 64 persen dan batubara sebanyak 28 persen. Dengan besarnya jumlah cadangan sumber energi tersebut, negara-negara anggota APA dapat membangun satu pasar yang terintegrasi guna menjamin kepastian ketersediaan energi bagi seluruh warga negara di Asia. Berupaya mewujudkan harapan tersebut, sidang ini pun telah berhasil menyusun *Draft Resolution on Asian Integrated Energy Market* untuk dapat dijadikan komitmen bersama parlemen negara-negara Asia ke depan.

Isu kemiskinan yang terjadi di Asia menjadi isu penting yang dibahas dalam sidang ini. Kolektivitas dan sinergi antar negara Asia disadari sangat penting dalam kondisi ekonomi yang sedang melambat saat ini, parlemen di negara-negara anggota APA harus fokus pada kebijakan yang mengurangi kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu sebab dari maraknya tingkat kejahatan lintas negara yang terdapat di Asia seperti masalah terorisme, radikalisme, narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara lainnya. Penekanan penting perlu dilakukan untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menyediakan dana publik yang cukup untuk pendidikan

dan kesehatan bagi semua orang, tanpa bias gender, dan untuk menghadapi tuntutan ekonomi global masa depan. Oleh karena itu, APA menyepakati sejumlah langkah untuk mengatasi kemiskinan di Asia. Di antaranya mendorong pemerintah di masing-masing negara mengadopsi kebijakan pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor*. Termasuk di dalamnya, upaya meningkatkan akses kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Isu lingkungan juga menjadi bahasan dalam sidang. Isu tersebut menjadi tantangan penting yang harus dihadapi bersama antara negara-negara Asia dikarenakan sebagian negara di Asia seperti Indonesia, Maldives, Singapura, dan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Menyadari hal tersebut, APA menguatkan kembali program penanaman sejuta pohon di kawasan Asia yang akan berdampak pada kelestarian lingkungan Asia. Sebagai tindak lanjut dari program ini telah dibuat pula kesepakatan untuk membuat laporan secara berkala kepada Sekjen APA agar untuk memantau keberhasilannya.

Resolusi Usulan Indonesia

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, DPR turut berperan serta dalam mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah. Peran diplomasi parlemen yang dilakukan DPR telah ikut membangun citra positif Indonesia di dunia internasional terutama di kawasan Asia. Selama ini, DPR berpartisipasi aktif dalam setiap sidang yang diadakan APA, baik sebagai tuan rumah berbagai sidang APA, pengusul resolusi dan menjadi Presiden APA selama periode Tahun 2008–2010.

Dalam sidang kali ini, Indonesia mengusulkan draf resolusi mengenai pembentukan dana stabilisasi regional untuk kawasan Asia pada isu *Financial Affairs*. Pembentukan dana ini dianggap perlu sebagai langkah antisipatif apabila terjadi krisis finansial berkelanjutan

di Asia. Langkah tersebut juga dapat dilakukan sebagai upaya mengurangi pengaruh dana moneter internasional yang seringkali mencantumkan syarat-syarat yang memberatkan bagi negara penerima bantuan. Usulan DPR sejalan dengan usulan Delegasi Parlemen Kuwait untuk memfasilitasi dan mempromosikan dana investasi negara atau *sovereign fund* serta mendorong investasi swasta dari Asia untuk tetap berada di Asia dan tidak pindah ke benua lainnya. Selama ini, *sovereign fund* yang dimiliki oleh negara-negara kaya di Asia seperti Kuwait telah banyak ditanamkan di Benua Eropa dan Amerika. Dengan adanya dana investasi dari negara-negara kaya di Asia seperti Kuwait ini, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di wilayah Asia. Masing-masing negara anggota APA juga diminta untuk membenahi persoalan utama investasi di negaranya seperti masalah transparansi, akuntabilitas dari birokrasi.

Selain memberikan usulan pada isu *financial affairs*, Indonesia juga telah mengusulkan satu resolusi baru untuk memperkuat peran parlemen dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Usulan Indonesia ini termuat dalam *Draft Resolution on the Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals*. Dalam penilaian DPR, Parlemen di Asia perlu terlibat secara aktif, bahkan sejak awal, dalam menentukan target nasional SDGs. Mulai dari tahap persiapan pelaksanaannya, pendanaan dan rencana pelaksanaannya di dalam negeri terutama dalam melakukan koordinasi antar kementerian terkait dan upaya sosialisasi ke berbagai pihak serta pelaporan baik melalui pemantauan dan evaluasi. Pencapaian target yang menjadi tujuan dalam SDGs pun perlu disusun dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing negara. Untuk mencapai SDGs, APA perlu mengajak pemerintahnya masing-masing untuk melakukan sinergi antara pembangunan manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan mulai saat ini juga harus mampu menjamin kondisi pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Selain itu, melalui fungsi legislasi yang dimilikinya, parlemen dapat memiliki keleluasaan untuk mengadopsi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kondisi negaranya masing-masing dalam mengimplementasikan SDGs.

Penutup

Rakyat Asia banyak berharap pada parlemen agar kawasan Asia menjadi wilayah yang penuh kemakmuran, perdamaian dan penuh persahabatan. APA harus menjadi bagian efektif dari harapan besar itu. APA harus mampu merumuskan langkah kerja nyata dan terukur untuk mendorong sinergitas agenda pertumbuhan ekonomi dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan bagi terciptanya perdamaian dan kemakmuran di Asia.

APA perlu menginisiasi pemerintah negara-negara di Asia agar mengambil pendekatan kebijakan baru yang diperlukan untuk mengembangkan strategi pertumbuhan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, seimbang dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan mengurangi kesenjangan ekonomi. APA mendorong pemerintah di masing-masing negara untuk membuat protokol penanganan krisis yang mengatur alokasi cadangan anggaran untuk mitigasi krisis ekonomi.

Referensi

Mohammad Shoelhi, "Diplomasi; Praktik Komunikasi Internasional", Bandung: Simbiosis Rekatama Internasional, 2011, hal 73.

"APA Charter", <http://asianparl.org/docs/Plenary/2007/APA%20Charter-%20FINAL.pdf> diakses tanggal 24 Agustus 2015.

"The Asian Parliamentary Assembly" <http://www.asianparliament.org/index.aspx?fkeyid=&siteid=280&pageid=4636> diakses tanggal 21 Agustus 2015.

"Sidang APA berhasil tuntas 2 Draft Resolusi", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10844> diakses tanggal 21 Agustus 2015.

"Indonesia Jadi Tuan Rumah Sidang Majelis Parlemen Asia", <http://warta-dpr.liputan6.com/read/2288724/indonesia-jadi-tuan-rumah-sidang-majelis-parlemen-asia> diakses pada tanggal 21 Agustus 2015.

"Sidang APA Dorong Investasi Asia Tetap di Asia", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10860> diakses pada tanggal 21 Agustus 2015.

"Maraknya Kejahatan Transnasional di Asia Berawal dari Kemiskinan", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10857> diakses tanggal 21 Agustus 2015.

"Proses Menuju Penyusunan agenda Pembangunan Paska-2015-Masukan Untuk Penyusunan ASEAN Post-2015", http://www.bappenas.go.id/files/6114/1101/2919/PROSES_MENUJU_PENYUSUNAN_AGENDA_PEMBANGUNAN_PASKA_2015_MASUKAN_UNTUK_PENYUSUNAN_ASEAN_POST_2015_-_19_september_2014_menkokesra.pdf diakses tanggal 17 Juni 2015.

"Ketua BKSAP Dapat Apresiasi di PBB", <http://www.dpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-851-2-2015.pdf> diakses tanggal 17 Juni 2015.

"Kerjasama Pembangunan Internasional: Dinamika Pembahasan Agenda Pembiayaan untuk Pembangunan", <http://infid.org/pdfdo/1425391468.pdf> diakses tanggal 17 Juni 2015.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 219.

The APA Draft Resolution on the Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals.

The APA Draft Resolution on Environmental Issues, Global Warming, Climate Change, and Planting Billions of Trees throughout Asia.

The APA Draft Resolution on Poverty Eradication.

The APA Draft Resolution on Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth.

The APA Draft Resolution on Asian Integrated Energy Market.